

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, H. Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asikin, Z. 2018. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Pranada Media Group.
- Asyhadie, H. Z., Adha, L. H., & Kusuma, R. (2024). *Perlindungan Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Pasca-BPJS*. Jakarta: Kencana.
- Bachtiar. 2019. *Metode penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Efendi, Jonaedi, & Ibrahim Johnny. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Jogiyanto Hartono, M. 2018. *Metode Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data*. Penerbit Andi.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Syahrur, S. T. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis*. CV. Dotplus Publisher.
- Rahim, MIF, SH, M., Rahim, A., SH, M., Guwi, J., & SH, M. 2020. *Kewenangan Kejaksanaan Mewakili Pemerintah-Rajawali Pers*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ramdhan, M. 2021. *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.
- Nurhadi, N., Rahman, F., Ma'ruf, A., & Kafaa, K. A. (2024). *Jaminan Sosial di Indonesia: Sejarah, Teori, dan Tantangan Masa Depan*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung.
- Purba, H., & Purba, M. H. Y. (2019). *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Putri, A. E. (2014). *Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*. Jakarta: CV Komunitas Pejabat Mediatama.
- Qamar, N., & Rezah, F. S., (2020). *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Qodim, N. (2021). *Aspek Hukum Badan Usaha Non-Badan Hukum di Indonesia*. Jakarta: UI Press.

Santoso, Aris P.A. 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Surachman, E.R. 2022. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: Sinar Grafika.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Ardhya, S. N. (2020). Tinjauan Yuridis Bentuk Ganti Kerugian Terhadap Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PT. PLN INDONESIA)(Studi Kasus Pemadaman Serentak Pada Beberapa Daerah di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 186-196.

Arifin, Tiara Sari Putri, & Raharjo, Adji Sulistiyono. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Perjanjian Wanprestasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. *Depositi Widyakarya: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 2(2), 205-224.

Dantes, K. F. (2019). Kedudukan Harta Kekayaan Debitor Yang Dibebankan Hak Tanggungan Terhadap Putusan Pailit. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(2), 95-101.

Dantes, K. F. (2022). Pengaturan Sistem Elektronik Dalam Pengambilan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas Yang Berkepastian. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(1), 527-536.

Dantes, K. F., & Adnyani, N. K. S. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Debitor Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 271-282.

Dewi, M. W., Kusuma, I. L., & Saputra, A. F. (2018). Effect of BPJS (Social Insurance Administration Organization) receivables management and inaction of BPJS claim repayment on private hospital financial funds flow in Surakarta. *International Journal of Economics, Business and Accounting Research (IJEBAAR)*, 2(03).

Dewi, N. P. N. S., Dantes, N. K. F., & Setianto, M. J. (2022). Wanprestasi Dalam Arisan Online Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia* 5(3), 239-251

- Hadi, I. G. A. A., & Dantes, K. F. (2021). Penyelesaian Sengketa Kontrak Antara Pemerintah Kabupaten Buleleng Dengan PT. Chandra Dwipa Terkait Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Taman Bung Karno Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 266-279.
- Handoyo, S., & Fakhriza, M. (2018). Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan. *Journal De Facto*, 5(1), 1-19.
- Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum UI. (2021). Laporan Riset Hukum tentang Penegakan Kepatuhan JKN pada Badan Usaha. Jakarta: UI Press.
- Luthfiah, U., Setiawan, E., Lucia, SS., (2015). Ketidaktepatan Sasaran Jamkesmas Berdasarkan Kriteria Miskin Pendataan Program Perlindungan Sosial. *Kesmas*, 9(4), 362–368.
- Maharani, A. P., Affandi, N. K., Bayu, M. B. K., & Afifah, D. F. (2025). Evaluasi Jaminan Kesehatan Indonesia Dan Malaysia Ditinjau Dari Model Formulasi Keputusan Dengan Indikator Keefektifan Dan Keterjagaan Kualitas. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(7), 4342-4350.
- Mediana, N. N. E. A., & Sukmaningsih, N. K. I. A. (2026). Gig Economy Dalam Hukum Ketenagakerjaan Sebagai Tantangan Baru Dalam Dunia Bisnis Digital. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 5(1), 5859-5867.
- Nasution, N. R. S., Kusmanto, H., & Situmorang, T. P. (2023). Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia: Analisis Perbandingan Perlindungan Sosial di Masa Pandemi Covid-19 dan Universal Basic Income (UBI). *PERSPEKTIF*, 12(2), 611-627.
- Nugraha, I. M. J. W., Dantes, K. F., & Suastika, I. N. (2022). Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(1), 209-219.
- Nurhadi, N., Rahman, F., Ma'ruf, A., & Kafaa, K. A. (2024). Risk Rationalities in Welfare State Policy and Practice in Indonesia: A Phenomenological Study of National Health Insurance in a Rural Community. *The International Journal of Community and Social Development*, 6(2), 149-165.
- Putri Devita Sari. (2021). Penerapan Konsep Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Dalam Memperoleh Jaminan Kesehatan. *OSF Preprints*.

- Safitri Puji Rahayu, Nuryakin, & Arni Surwanti. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepercayaan dan Kepuasan Pasien BPJS. *Media Publikasi Promosi Kesehatan Indonesia (MPPKI)*, 5(1), 65–72.
- Setyawati, N. K. T., Windari, R. A., & Hadi, I. G. A. A. (2024). Implementasi Ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Ud Sari Karya Desa Belantih, Kintamani, Bangli. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 7(1), 78-88.
- Sinaga, N. A., & Darwis, N. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 43-57.
- Siregar, W., Siregar, M. H., & Nasution, M. I. P. (2025). Pengaruh Telecompliance dalam Peningkatan Kolektibilitas Iuran JKN BPJS Kesehatan Segmen PPU BU Cabang Padangsidempuan. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(1), 464-490.
- Tarmudi, T., & Putra, A. A. (2023). Aspek Hukum Wanprestasi Pada Perjanjian Jual Beli Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *IUS FACTI: Jurnal Berkala Fakultas Hukum Universitas Bung Karno*, 1(2), 99–114.
- Trisna, I. M. A. (2018). Tanggung Jawab Hukum Badan Usaha dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional. *Jurnal Kertha Semaya*, 6(11), 244–254.
- Windari, R. A., Dewi, Y. K., & Wibisana, A. G. (2023). The Reflexive Law and Reformulation of Corporate Social Responsibility Regulation in Indonesia. *J. Legal Ethical & Regul. Issues*, 26, 1.
- Wulandari, S. (2023). Pencegahan fraud dalam program JKN BPJS Kesehatan. *Jurnal Administrasi Kesehatan*, 15(1), 25–37.
- Yudianto, O., Prasyawati, E., & Emil. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Badan Usaha dalam Kasus Ketidakpatuhan terhadap Program BPJS. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(1), 66–81.
- Yudiawan, I. D. G. H., & Putra, I. K. T. A. (2021). Penerapan Sanksi Administratif Kepada Masyarakat Berdasarkan Peraturan Gubernur. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(2), 728-735.
- Yuditia, A., Hidayat, Y., & Achmad, S. (2021). Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Oleh BPJS Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem

Jaminan Sosial Nasional. Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan, 6(1), 43–61.

Yustina, A. M. H. (2024). Penerapan Sanksi Administratif Bagi Badan Usaha Yang Tidak Ikut Serta Dalam Kepersertaan BPJS Kesehatan Menurut Peraturan Nomor 86 Tahun 2013. Web Of Scientist: International Scientific Research Journal, 3(1), 1–7.

Yusuf, F. M., & Thohari, A. A. (2024). Konsekuensi Hukum terhadap Perusahaan dan Tenaga Kerja Akibat Ketidakpatuhan dalam Pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerjaan. Jurnal USM Law Review, 7(3), 1674–1682.

Zulfa, E. (2021). Laporan Riset Bina Hukum Nasional: Optimalisasi Kepatuhan Pembayaran Iuran JKN oleh Pemberi Kerja. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kemenkumham.

SKRIPSI

Alwi, R.F. (2018). Efektifitas Penerapan Sanksi Administratif dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Badan Usaha Terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional. Skripsi, Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar.

Rochmad, Z. (2018). Hubungan Kontraktual antara Peserta dengan BPJS Kesehatan dalam Perspektif Hukum Perdata. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Wulandari, Gustri. (2020). Upaya Peningkatan Kepatuhan Kepesertaan BPJS Perusahaan pada Kantor BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Cipta Kerja jo. Undang-Undang Nomor

6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116.

Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238.

